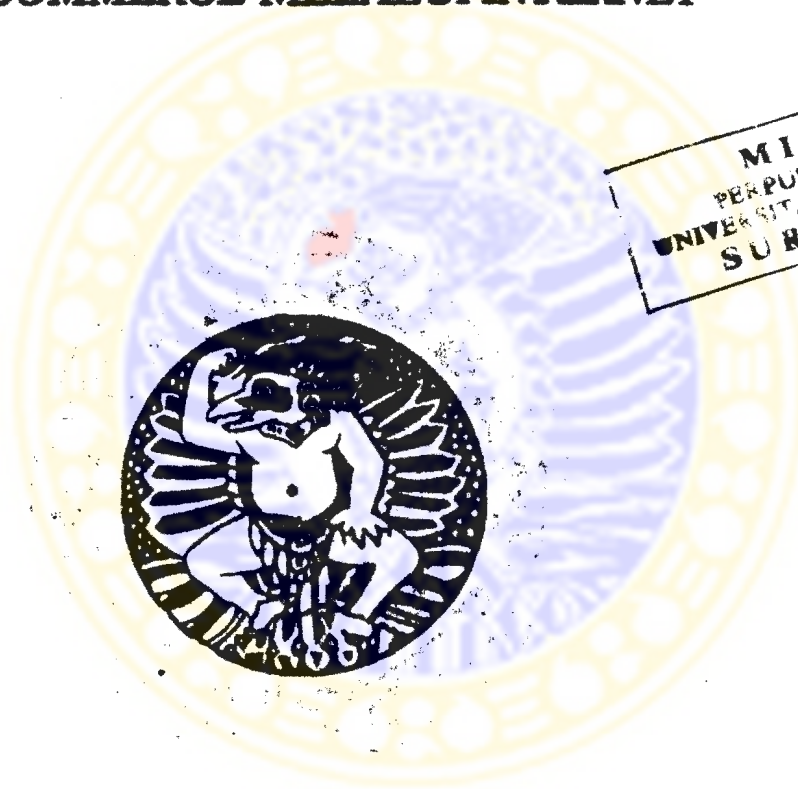


Per 64/01
Dew
P

SKRIPSI

SYLVIA DEWI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN
KARTU KREDIT SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
*E - COMMERCE MELALUI INTERNET***



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN
KARTU KREDIT SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
*E - COMMERCE MELALUI INTERNET***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi
Tugas-Tugas Guna Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
Dalam Bidang Ilmu Hukum**



Dosen Pembimbing.

Penyusun

A. Yudha Hernoko, S.H., M.H.
NIP. 131 878 393

Sylvia Dewi
NIM 039614414

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 0 1**

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

- a. Berlakunya kartu kredit untuk suatu pembayaran dalam transaksi *e-commerce* ini didasari dengan perjanjian penggunaan kartu kredit yang dalam penyusunannya menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana pasal 1338 ayat (1) jo pasal 1320 BW, berpijak dari asas ini maka hubungan para pihak dalam transaksi *e-commerce* ini diikat dengan perjanjian baku.
- b. Di saat proses pembayaran dilakukan, sering terjadi penyimpangan terhadap keamanan informasi kartu kredit. Walaupun dalam transaksi tersebut sudah menggunakan sistem pengaman, tapi bisa saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak ketiga (*man in the middle*) dengan mencuri informasi kartu kredit, yang telah dienkripsi. Karena itu, sebelum membeli suatu barang, sebaiknya pembeli harus mengetahui terlebih dahulu kebijakan *privacy situs* tersebut dan hak-haknya, hukum yang akan melindungi hak pembeli. Pada saat menggunakan *password* sebaiknya menghindari nomor yang sudah ada, jangan menggunakan *password* yang sama dengan situs yang lain yang pernah dijelajahi.

Pembeli harus yakin bahwa situs tersebut aman yaitu dengan melihat “kunci yang tersambung (utuh tidak terputus) di sebelah pojok kiri bawah”, ini menandakan situs ini aman. Selain bentuk perlindungan tersebut, Burgelijk Wetboek juga memberikan bentuk perlindungan hukum di mana pengguna

kartu kredit (pelanggan) dapat mengajukan gugatan perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi apabila terjadi wanprestasi akibat diadakannya perjanjian berdasarkan pasal 1338 ayat(1) jo pasal 1320 B.W.

2. S a r a n

- a. Sehubungan dengan hubungan hukum yang timbul diantara para pihak, penggunaan kartu kredit untuk bertransaksi dalam e-commerce, hanyalah berdasarkan perjanjian diantara para pihaknya. Untuk itu dipandang perlu adanya perlindungan bagi para pihak tersebut, yaitu perlindungan akan informasi kartu kredit dan hak-haknya apabila terjadi sengketa
- b. Perlu dibicarakan adanya penyusunan RUU Cyber Indonesia yang mengatur mengenai tambahan pada norma hukum dan peraturan yang ada di dunia nyata. Misalnya hukum perjanjian dan digital signatur (tanda tangan digital, akses ilegal jaringan komputer atau penyalahgunaan password dalam e-commerce, cara menangkap dan menerapkan hukum bagi pelakunya.